

**TINGKAT KEPERCAYAAN POLITIK MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SUKABUMI
 (Studi Kasus pada Penangkapan Dua Anggota Dewan Tahun 2023)**

Dilla Maulida¹; Yusa Djuyandi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
 Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: dilla20001@mail.unpad.ac.id; yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Submitted: 28-02-2024; Accepted: 20-03-2024; Published :21-03-2024

ABSTRAK

Kepercayaan politik merupakan unsur penting bagi negara demokrasi karena masyarakat memiliki keyakinan pada Lembaga politik yang kemudian mendorong pada partisipasi politik. Kepercayaan politik juga merupakan wadah masyarakat untuk melakukan evaluasi pada Lembaga politik dan aktor politik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kepercayaan politik di DPRD Kota Sukabumi pasca ditangkapnya dua anggota dewan pada tahun 2023. Fenomena tersebut dapat dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori kepercayaan politik dari Russel J Dalton dengan tiga dimensi yang diukur yaitu integritas, keterbukaan, dan kontrol atas mutualisme. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk menilai tingkat kepercayaan politik masyarakat pasca penangkapan anggota dewan. Responden sasaran pada penelitian ini yaitu penduduk Kota Sukabumi sebanyak 356.410 penduduk, kemudian diambil sampel dengan rumus slovin yaitu 100 masyarakat kota sukabumi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling insidental. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam persepsi integritas anggota dewan dan citra lembaga DPRD setelah penangkapan tersebut. Selain itu, masyarakat sudah menilai adanya keterbukaan namun masih dirasa belum cukup ruang dalam komunikasi dengan dewan secara langsung pada proses kontrol atas mutualisme. Penilaian tingkat kepercayaan masyarakat pada DPRD Kota Sukabumi pasca penangkapan dua dewan menunjukan hasil 2,3 pada skala likert atau 47%, sehingga dapat dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat rendah pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023.

Kata kunci: Kepercayaan Politik; Kepercayaan Masyarakat; Representatif; DPRD Kota Sukabumi.

ABSTRACT

Political trust is an important element for a democratic country because people have confidence in political institutions which then encourages political participation. Political trust is also a forum for society to evaluate political institutions and political actors. This research is motivated by the dynamics of political trust in the Sukabumi City DPRD following the arrest of two council members in 2023. This phenomenon can be studied and analyzed using Russel J Dalton's theory of political trust with three dimensions measured, namely integrity, openness, and control over mutualism. This research uses a quantitative method using a questionnaire as the main instrument to assess the level of political trust in the community after the arrest of council members. The target respondents in this research were the 356,410 residents of Sukabumi City, then samples were taken using the Slovin formula, namely 100 residents of Sukabumi City. In taking samples, researchers used incidental sampling techniques. The research results showed a significant decline in the perceived integrity of council members and the image of the DPRD institution after the arrest. Apart from that, the community has assessed that there is openness but still feels that there is not enough space for communication with the council directly in the process of controlling mutualism. An assessment of the level of public trust in the Sukabumi City DPRD after the arrest of two council members showed a result of 2.3 on a Likert scale or 47%, so it can be said that the level of public trust is low after the arrest of two council members in 2023.

Keywords: Political Trust; Public Trust; Representative; Sukabumi City DPRD.

PENDAHULUAN

Kepercayaan politik adalah sebuah konsep dalam ilmu politik yang mengkaji bagaimana individu atau kelompok mempertahankan atau mengubah kepercayaan mereka terhadap sistem, institusi, dan aktor politik. Kepercayaan politik masyarakat penting dalam konteks politik dan sosial, hal tersebut dikemukakan dalam buku *The Civic Culture* oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba menekankan bahwa kepercayaan politik adalah elemen kunci dalam penciptaan dan keberlanjutan sistem politik yang stabil dan efektif. Kepercayaan politik juga diartikan sebagai kemampuan dan keinginan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan keyakinan terhadap kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku pemerintah (Russell J. Dalton (dalam Fatmawati, 2018)).

Kepercayaan politik dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, dukungan terhadap pemerintah, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan iklim demokrasi yang sehat, penting dilakukan penelitian dan analisis terhadap tingkat kepercayaan politik masyarakat di daerah. Menurut teori kepercayaan politik Russell J. Dalton, kepercayaan politik memiliki 10 dimensi yaitu kompetensi, integritas, dapat diandalkan, keterbukaan dan kejujuran, kerapuhan, kepedulian terhadap Masyarakat, identifikasi, kontrol atas mutualisme, kepuasan, dan komitmen.

Kajian ini fokus pada lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Hobbes, pemerintah memerlukan perwakilan untuk bertindak dan semua wakil rakyat harus mendapat persetujuan rakyat dalam bertindak dan harus diberikan hak untuk bertindak atas nama rakyat, karena wakil yang bertindak harus sejalan dengan kehendak rakyat atau pemilih. Kemudian, konsep representasi dikembangkan oleh Hanna Fenichel Pitkin dalam bukunya yang berjudul *The Concept of Representation*.

Dalam bukunya, Hannah Pitkin mencoba menggali secara tidak langsung konsep representasi dan menyimpulkan bahwa institusi dianggap representatif karena dua variabel: legitimasi dan akuntabilitas representasi. Legitimasi bukan sekedar prosedur hukum, ia memerlukan pengakuan dari masyarakat, pengakuan dari otoritas pusat, dan pengakuan dari politisi.

Pada penelitian ini akan meneliti bagaimana kepercayaan politik mempengaruhi legitimasi dan persepsi masyarakat terhadap DPRD. Daerah yang diteliti adalah Kota Sukabumi yang sedang terjadi fenomena-fenomena yang menciptakan dinamika kepercayaan politik. Pasalnya, anggota DPRD Kota Sukabumi terlibat peristiwa penggelapan mobil. Terdapat dua anggota DPRD yang terlibat dalam kasus penipuan ini yaitu Jona Arizona (Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi) dan Ivan Rusvansyah Trisya (Ketua Komite Ekonomi II DPRD Kota Sukabumi). Dua anggota tersebut tergabung dalam Partai Golongan Karya (Golkar).

Jona Arizona ditangkap pada 24 Maret 2023 bersama tersangka lainnya berinisial H. Jona Arizona ditangkap Bareskrim Kota Sukabumi setelah dipanggil kedua kalinya atas tuduhan penggelapan mobil Mitsubishi Pajero. Jona Arizona awalnya menyewa mobil dari Bubut Rental di Cijagra, provinsi Bandung mulai Oktober 2022 dengan biaya sewa mingguan sebesar Rp 6 juta. Jona Arizona menawarkan masa sewa hingga 5 bulan, namun Jona tidak datang ke rental untuk dilakukan perawatan mobil. Kemudian pihak renta mendatangi rumah Jona Arizona dan mencoba untuk musyawarah namun tidak ada respon positif sehingga Jona dilaporkan ke polisi. Menurut artikel berita Tvone, Jona sebelumnya pernah ditangkap dalam kasus yang sama dan didakwa melakukan penggelapan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi yaitu Ivan Rusvansyah Trisya ditangkap dengan kasus yang sama yaitu penggelapan mobil. Ivan ditangkap bersama pelaku lainnya berinisial EID yang sekaligus merupakan istri Ivan pada tanggal 17 Mei 2023 di daerah Kota Sukabumi, tepatnya daerah

Babakan Bandung. Ivan ditetapkan tersangka pada tanggal 18 Mei 2023 atas kasus penggelapan mobil yang berjenis mobil Honda Civic Turbo milik perusahaan finance yaitu PT. Mandiri Utama Finance (MUF).

Fenomena ini mempengaruhi dinamika kepercayaan masyarakat di Kota Sukabumi. Ada berbagai reaksi negatif yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPRD. Kemunculan gerakan yang dinamis terlihat dari berbagai komentar di media sosial berita lokal Kota Sukabumi melalui akun Instagram @sukabumiupdatecom. namun reaksi tersebut belum bisa dianggap sebagai data karena belum teruji. Oleh karena itu, penting meneliti dan mengkaji fenomena tersebut.

Dinamika kepercayaan politik masyarakat merupakan suatu bentuk reaksi dimana masyarakat mempercayai dan menaruh harapannya pada institusi dan aktor politik. Menurut Lewicki dan Bunker (Qosthalani, 2020), kepercayaan merupakan keinginan individu terhadap pihak rentan lainnya. Definisi kepercayaan menekankan pada risiko. Artinya jika harapan seseorang tidak dipenuhi oleh orang lain, maka orang tersebut akan mengalami akibat negatif seperti kekecewaan. Sikap budaya para elit merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya demokrasi yang stabil. Hal ini dikemukakan oleh Almond dan Verba (1963) dalam teori budaya sipilnya, dan kemudian dieksplorasi lebih lanjut oleh Inglehart (1988), bahwa sikap seperti kepercayaan memfasilitasi kemampuan pengambilan keputusan politik individu. menentukan kelangsungan hidup lembaga-lembaga demokrasi.

Bukti empiris adanya keterkaitan antara sikap elite dengan demokrasi ditunjukkan dalam penelitian Gibson (1988) yang menunjukkan bahwa sikap toleran masyarakat, sikap toleran politik elite, dan sikap politik represif menunjukkan adanya hubungan sebab akibat di antara keduanya.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tingkat kepercayaan politik masyarakat terhadap DPRD Kota Sukabumi pasca penangkapan dua anggota dewan. Adapun peneliti juga mengidentifikasi tingkat

kepercayaan masyarakat tersebut melalui indikator yang disesuaikan dengan relevansi fenomena masalah dari penelitian ini. Relevansi antara kepercayaan masyarakat terhadap persepsi politik pada lembaga legislatif Kota Sukabumi, tentunya memiliki dinamika permasalahan yang cukup kompleks sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti fenomena masalah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pada perolehan data menggunakan alat atau instrumen berupa kuesioner dengan olah data dan analisis data menggunakan bantuan SPSS.

Populasi yaitu suatu ruang umum yang didalamnya mencakup suatu objek maupun subjek yang memiliki ciri atau sifat tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti, yang dapat dipelajari dan dianalisis untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013: 117). Pada penelitian ini populasi yang digunakan yaitu jumlah penduduk Kota Sukabumi yang berjumlah 356.410 penduduk, dan menggunakan Teknik sampel insidental. Adapun pembagian sampel menggunakan rumus slovin menghasilkan 100 sample, kemudian dilakukan perhitungan sampel pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	Pengambilan Sampel	Jumlah Responden
1	Baros	39.548	$39.548 / 356.410 \times 100$	11
2	Lembursitu	43.098	$43.098 / 356.410 \times 100$	12
3	Cibeureum	47.247	$47.247 / 356.410 \times 100$	13
4	Citamiang	54.154	$54.154 / 356.410 \times 100$	15
5	Warudoyong	60.23	$60.236 / 356.410 \times 100$	17
6	Gunung Puyuh	49.230	$49.230 / 356.410 \times 100$	14
7	Cikole	62.897	$62.897 / 356.410 \times 100$	18
Total				100

Selanjutnya peneliti akan mengolah sampel yang masuk dan menentukan 100 sampel yang memenuhi syarat, dalam penentuan sampel menggunakan sampel insidental. Adapun kriteria yang dapat menjadi responden adalah masyarakat Kota Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan Masyarakat Kota Sukabumi dengan pembagian proporsional berdasarkan 7 Kecamatan Kota Sukabumi. Karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin terdapat responden Laki-laki sebanyak 43 dan responden Perempuan sebanyak 57.

Berikutnya, karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Umur	Jumlah
17-22	25
23-27	16
28-32	17
33-37	9
38-42	12
>43	21

Selanjutnya responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pendidikan Responden	Jumlah
SMP	1
SMA / Sederajat	38
Diploma	10
Sarjana	51
Total	100

B. Hasil Uji Instrumen

Pada uji instrumen dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji Validitas yaitu uji untuk kuesioner yang telah dibuat apakah valid atau tidak. Kuesioner sebagai alat memperoleh data juga harus dikatakan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat kriteria dalam mengetahui data dikatakan valid yaitu dengan korelasi *pearson*.

Uji Validitas *political trust* mencakup tiga dimensi yang telah dijabarkan kedalam 10 pernyataan menggunakan rumus *pearson correlation* dengan bantuan SPSS 27.0. Tabel di bawah ini menunjukkan uji validitas.

Tabel: Hasil Uji Validitas

Dimensi	Butir pernyataan	R Tabel	R Hitung
Integritas	1	0.1966	0.599
	2	0.1966	0.590
	3	0.1966	0.583
	4	0.1966	0.485
Keterbukaan dan kejujuran	5	0.1966	0.529
	6	0.1966	0.348
	7	0.1966	0.394
Kontrol atas Mutualisme	8	0.1966	0.608
	9	0.1966	0.438
	10	0.1966	0.625

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka dari 3 dimensi dengan 10 pertanyaan setelah diuji, hasilnya valid, hal tersebut karena r_{hitung} menunjukkan nilai yang lebih besar daripada r_{tabel} yaitu 0.196. sehingga, berdasarkan hasil uji validitas maka pernyataan dalam kuesioner penelitian dapat digunakan dan mampu dalam mengukur variabel *Political Trust*.

Berikutnya dilakukan uji reliabilitas yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa konsisten pengukuran ketika pengujian dijalankan berkali-kali, sehingga peralatan yang digunakan dapat dipercaya dan digunakan sebagai sumber pengumpulan data. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	10

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2024

Variabel menghasilkan angka Cronbach's alpha yaitu 0,705. Angka tersebut menunjukkan lebih besar daripada 0,6 yang berarti variabel *Political Trust* dinyatakan valid. Maka, dapat kita simpulkan bahwa jawaban responden konsisten atau dapat dipercaya.

C. Analisis Deskripsi

Variabel *Political Trust* diukur dari dimensi integritas, keterbukaan dan kejujuran, dan dimensi kontrol atas mutualisme.

Terdapat 4 (Empat) item pernyataan untuk dimensi integritas yaitu:

1. Saya menilai reputasi anggota dewan tidak menurun akibat pengaruh penangkapan dua anggota dewan tahun 2023
2. Saya menilai reputasi lembaga DPRD Kota Sukabumi tidak menurun setelah kejadian penangkapan dua anggota dewan tahun 2023
3. Saya melihat anggota dewan patuh akan norma etika yang berlaku
4. Saya melihat upaya yang efektif dari anggota dewan dan DPRD Kota Sukabumi dalam pemulihan citra

Skor jawaban responden untuk dimensi integritas yaitu 991 pada kategori tidak setuju. Namun, pada pernyataan “Saya melihat upaya yang efektif dari anggota dewan dan DPRD Kota Sukabumi dalam pemulihan citra” mendapatkan skor tertinggi, sehingga responden melihat adanya Upaya yang positif yang dilakukan oleh aktor politik yaitu anggota dewan dan secara kelembagaan DPRD Kota Sukabumi adanya upaya pemulihan citra.

Masyarakat Kota Sukabumi menilai reputasi dewan dan reputasi secara kelembagaan menurun setelah kejadian penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan sebuah sikap dari anggota dewan yang tidak bisa mencerminkan sebagai seseorang yang telah menjadi tokoh publik yang dimana sebuah sikap menjadi suatu prasyarat awal untuk masyarakat menilai tingkat kepercayaan politik dan menjadi sebuah modal utama dalam berpolitik. Dinamika kepercayaan masyarakat nampak jelas saat salah satu anggota dewan yang tertangkap yaitu Jona Arizona dikatakan bebas dari tuduhan dan tidak dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga sampai tahun 2024 ini Jona masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi. Hal tersebut terlihat pada *press release* DPRD Kota Sukabumi saat melakukan rapat paripurna, Jona duduk di kursi

pimpinan dan menandatangani dokumen yang dibahas pada rapat paripurna tersebut. Keputusan tidak dilakukan PAW membuat menurunnya tingkat kepercayaan politik masyarakat terhadap DPRD, disisi lain dapat dilihat bahwa masyarakat kota sukabumi memiliki sikap toleransi untuk membiarkan anggota dewan tersebut masih duduk di kursi dewan dan masih bisa melihat adanya upaya dari DPRD Kota Sukabumi dalam pemulihan citra dan memperkuat integritas di dalam kelembagaan.

Tidak cukup pada keadaan seperti itu, situasi politik di kota sukabumi terdapat pergolakan saat Ketua Komisi II yaitu Ivan Rusvansyah Trisya yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, kembali dilaporkan kembali atas kasus yang berbeda. Ivan yang saat itu berbekam di lapas IIB Sukabumi, ivan ditangkap oleh kejaksaan atas penipuan pangkalan gas LPG yang kerugian mencapai Rp. 1,2 miliar. Ivan saat ini telah dihapus dari struktur kepengurusan partai Golkar.

Pasca kejadian penangkapan kedua anggota dewan tersebut, masyarakat menilai menilai citra dan integritas DPRD Kota Sukabumi menurun. Temuan tersebut dapat dilihat pada instrumen pengukuran dimensi integritas yang menunjukkan rata-rata skala likert 2.4 kategori tidak setuju dengan integritas DPRD Kota Sukabumi. Walaupun fenomena tersebut membuat adanya penurunan tingkat kepercayaan, namun tingkat kepercayaan politik masyarakat dapat ditingkat dengan adanya upaya-upaya pemulihan citra dari DPRD Kota Sukabumi ataupun dari dewan secara langsung.

Berikutnya dimensi Keterbukaan dan Kejujuran dengan tiga item pernyataan sebagai berikut:

1. Menurut saya DPRD Kota Sukabumi telah melakukan komunikasi dan transparansi mengenai kejadian penangkapan dua anggota dewan tahun 2023
2. Saya yakin bahwa DPRD Kota Sukabumi memastikan konsistensi dalam menyampaikan informasi

3. Saya melihat DPRD Kota Sukabumi sering melakukan press conference untuk merespon kekhawatiran Masyarakat

Rata-rata jawaban pada dimensi keterbukaan dan kejujuran yaitu tidak setuju. Pada pernyataan “Menurut saya DPRD Kota Sukabumi telah melakukan komunikasi dan transparansi mengenai kejadian penangkapan dua anggota dewan tahun 2023” mendapatkan skor tertinggi yaitu 264, hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi dan transparansi mengenai kejadian penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Pada pernyataan “Saya melihat DPRD Kota Sukabumi sering melakukan press conference untuk merespon kekhawatiran Masyarakat” mendapatkan skor terendah yaitu 177. Dari dimensi keterbukaan dan kejujuran, DPRD Kota Sukabumi telah melakukan komunikasi yang transparan kepada konstituen lewat media sosial, namun DPRD Kota Sukabumi dinilai tidak sering melakukan *press conference*.

Dalam skala likert, dimensi keterbukaan menunjukkan rata-rata pada skala 2,11 yang berarti masyarakat menilai belum dirasa cukup DPRD secara terbuka menyampaikan informasi mengenai penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Pada penyediaan informasi, DPRD Kota Sukabumi cukup terbuka tetapi tidak memberikan respon kepada masyarakat. Tingkat kepercayaan semakin menurun saat DPRD Kota Sukabumi tidak memberikan informasi kepada publik mengenai proses hukum dan tidak memberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang diambil oleh DPRD dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan demikian, tidak adanya ruang untuk komunikasi yang terbuka antara DPRD Kota Sukabumi dengan masyarakat dalam bertukar informasi.

Sebuah masalah yang terjadi pada aktor di dalam struktur instansi politik menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat dan tidak adanya respon yang diberikan oleh DPRD untuk meredakan masyarakat. Setelah masalah ini berlalu, diharapkan DPRD Kota Sukabumi mampu

menyusun langkah-langkah dalam menangani yang kemungkinan akan terjadi di masa depan dan strategi untuk memulihkan kepercayaan politik masyarakat dengan memberikan informasi secara terbuka dan memberitahu langkah-langkah yang akan diambil DPRD Kota Sukabumi sebagai bentuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Berikutnya pada dimensi Kontrol atas mutualisme terdapat tiga pernyataan yaitu:

1. Menurut saya hubungan anggota dewan dengan Masyarakat tetap positif pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023
2. Menurut saya anggota dewan sering melakukan diskusi public untuk memulihkan hubungan mutualisme dengan Masyarakat
3. DPRD secara terbuka menerima masukan dan control yang dilakukan Masyarakat

responden tidak setuju terhadap kontrol atas mutualisme antara rakyat dan DPRD Kota Sukabumi pasca kasus penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Pada 3 item pernyataan terdapat pernyataan yang memiliki skor tertinggi yaitu pernyataan “Menurut saya hubungan anggota dewan dengan masyarakat tetap positif pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023” dengan skor 256, hal ini Masyarakat masih memandang hubungan rakyat dan DPRD berjalan secara positif, namun disisi lain dalam pernyataan “Menurut saya anggota dewan sering melakukan diskusi publik untuk memulihkan hubungan mutualisme dengan masyarakat” memiliki skor terkecil yaitu 226. Dari dimensi kontrol atas mutualisme dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rakyat dan DPRD Kota Sukabumi dapat dibilang masih positif walaupun anggota dewan tidak terlalu sering melakukan diskusi publik.

Setelah analisis deskripsi pada setiap dimensi, maka secara keseluruhan dari tingkat kepercayaan politik masyarakat terhadap DPRD Kota pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan. Dalam skala likert, tingkat

kepercayaan politik berada pada 2.3 atau dalam persentase sebesar 47% dalam kategori rendah.

2023 berada pada kategori rendah yaitu sebesar 47%.

SIMPULAN

Pada penelitian Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kepercayaan politik masyarakat pada DPRD Kota Sukabumi dengan studi kasus pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dua dewan DPRD Kota Sukabumi yang tersandung kasus penggelapan memberikan dampak yang signifikan dalam turunnya kepercayaan politik masyarakat.
2. Tingkat kepercayaan politik masyarakat pada dimensi integritas menunjukan masyarakat menilai citra dewan dan DPRD Kota Sukabumi menurun pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Pada skala likert menunjukan skala 2,4 kategori tidak setuju atau tidak percaya.
3. Ruang komunikasi antara DPRD Kota Sukabumi dengan masyarakat dirasa kurang, hal tersebut dapat dilihat pada dimensi keterbukaan dan kejujuran yang menunjukan skala likert 2,11 karena tidak adanya diskusi publik ataupun *press conference* dalam menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai kasus penangkapan dua anggota dewan tahun 2023.
4. Komunikasi yang terjalin dinilai kurang efektif, sehingga hal tersebut menyebabkan hubungan antara DPRD Kota Sukabumi dengan masyarakat menjadi kurang kuat. hal tersebut dapat dilihat dari dimensi kontrol atas mutualisme yang menunjukan bahwa hubungan dengan masyarakat kurang kuat.
5. Hasil penelitian dengan tiga dimensi, tingkat kepercayaan politik masyarakat kepada DPRD Kota Sukabumi pasca penangkapan dua anggota dewan tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, I. (2021). Understanding the Psychological Perspective of Political Trust in Indonesia Context. *Buletin Psikologi*, 29(2), 161. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.57311>
- Awaludin, A. (2023, May 18). *Dicoret dari Pengurus Partai, Anggota DPRD Kota Sukabumi Diduga Gelapkan Mobil - Sukabumi Update*. Dicoret Dari Pengurus Partai, Anggota DPRD Kota Sukabumi Diduga Gelapkan Mobil - Sukabumi Update. <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/120062/dicoret-dari-pengurus-partai-anggota-dprd-kota-sukabumi-diduga-gelapkan-mobil>
- Bargsted, M., Ortiz, C., Cáceres, I., & Somma, N. M. (2022). Social and Political Trust in a Low Trust Society. *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09762-2>
- Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical Leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117–134.
- Chaerunisa. (2022). *KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH: (STUDI TENTANG PERSEPSI DAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA WARU, KECAMATAN PARUNG, BOGOR, JAWA BARAT)*.
- Delhey, J., & Newton, K. (2002). *Who Trusts? The Origins of Social Trust in Seven Nations*.
- Fakta Dibalik Penangkapan Ivan Rusvansyah Trisya Anggota DPRD Kota Sukabumi - *Investigasi*. (2023, May 19). *Investigasi.news*.

- <https://investigasi.news/nasional/suka-bumi/fakta-dibalik-penangkapan-ivan/>
- Fatmawati, F. (2018). *Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon: Studi pada Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Pasca Wakil Bupati Menjadi Tersangka*.
- Herdiansyah, D. (2023a, May). *Dua Kader Potensial Tersangkut Kasus Hukum, Golkar Tetap Yakin Raih 9 Kursi DPRD Kota Sukabumi*. *Tribunjabar.id*. <https://jabar.tribunnews.com/2023/05/19/dua-kader-potensial-tersangkut-kasus-hukum-golkar-tetap-yakin-raih-9-kursi-dprd-kota-sukabumi>
- Herdiansyah, D. (2023b, May). *Gelapkan Mobil Mewah, Anggota DPRD Kota Sukabumi Ini Resmi Ditetapkan Tersangka, Kini Ditahan*. *Tribunjabar.id*. <https://jabar.tribunnews.com/2023/05/18/gelapkan-mobil-mewah-anggota-dprd-kota-sukabumi-ini-resmi-ditetapkan-tersangka-kini-ditahan>
- Herdiansyah, D. (2023c, May). *Ini Penyebab Anggota DPRD Sukabumi Ini Dilaporkan, Sempat Beri Cek Sisa Tagihan tapi Tak Bisa Cair*. *Tribunjabar.id*. <https://jabar.tribunnews.com/2023/05/18/ini-penyebab-anggota-dprd-sukabumi-ini-dilaporkan-semapat-beri-cek-sisa-tagihan-tapi-tak-bisa-cair>
- Hidayat, S. (2023, March). *Jona Arizona Ditahan Polisi, Phinera Wijaya Diangkat Jadi Plt Golkar Kota Sukabumi - Sukabumi Update*. *Jona Arizona Ditahan Polisi, Phinera Wijaya Diangkat Jadi Plt Golkar Kota Sukabumi - Sukabumi Update*. <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/117108/jona-arizona-ditahan-polisi-phinera-wijaya-diangkat-jadi-plt-golkar-kota-sukabumi>
- Hooghe, M. (2011). Why There is Basically Only One Form of Political Trust. *The British Journal of Politics and International Relations*, 13(2), 269–275. <https://doi.org/10.1111/j.1467-856x.2010.00447.x>
- Kurnia, C., & Bayu, E. (2023, April 1). *Cerita Wakil Ketua DPRD Sukabumi Gadaikan Mobil Rental untuk Proyek, Langsung Ditangkap Polisi*. *Www.tvonenews.com*. <https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/111733-cerita-wakil-ketua-dprd-sukabumi-gadaikan-mobil-rental-untuk-proyek-langsung-ditangkap-polisi?page=all>
- La Husen Zuada, Samad, M. A., & Aisyah, N. (2019). Kajian Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 9–22. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.11>
- Li, P., & Wang, L. (2022). Does Political Trust Matter for Charitable Giving? The Antecedence and Consequence of Trust in Local Officials. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*. <https://doi.org/10.1007/s11266-022-00535-x>
- M. Ali Iqbal, & Wahyuni Pudjiastuti. (2011). Kepercayaan Publik terhadap DPR dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Forum Ilmiah*, 8(02).
- NEWTON, K. (1997). Social Capital and Democracy. *American Behavioral Scientist*, 40(5), 575–586. <https://doi.org/10.1177/0002764297040005004>
- Nurdiarti, R., & Nastain, M. (2021). Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRD Kota Yogyakarta Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *ETTISAL : Journal of Communication*, 6(1), 99. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.5070>
- Penyelenggara Negara : Etika Pejabat Publik Memburuk - Berita - Lembaga Administrasi Negara*. (n.d.).

- Makarti.lan.go.id.
<http://makarti.lan.go.id/berita-/blogs/penyelenggara-negara-etika-pejabat-publik-memburuk>
- Pitkin, H. (1967). *The concept of representation*. University Of California Press.
- Restiani Fauzie. (2018). Adaptasi Dan Validasi Skala Political Trust Dan Political Efficacy. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
<https://doi.org/10.15408/jp3i.v3i4.9319>
- Siregar, S. (2017). *Metode Pemilihan Kuantitatif*. Prenada Media.
- Sosok Jona Arizona Wakil Ketua DPRD Sukabumi yang Ditangkap karena Dugaan Gadaikan Mobil Rental. (2023, June). *Tribunjabar.id*.
<https://jabar.tribunnews.com/2023/03/31/sosok-jona-arizona-wakil-ketua-dprd-sukabumi-yang-ditangkap-karena-dugaan-gadaikan-mobil-rental?page=all>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : (pendekatan kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta.
- Uslaner, E. M. (2018). *The Oxford handbook of social and political trust*. Oxford University Press.
- Vázquez ArroyoA. Y. (2016). *Political responsibility : responding to predicaments of power*. Columbia University Press.